

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kinerja suatu perekonomian, khususnya dalam menganalisis hasil dari upaya pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh suatu negara atau daerah. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terdapat peningkatan dalam produksi barang dan jasa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi mencerminkan tingkat kemampuan aktivitas ekonomi dalam menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat dalam periode waktu tertentu (Cristiani & Projo, 2022).

Setiap negara pada dasarnya memiliki tujuan utama dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yaitu untuk mencapai kemakmuran, baik untuk negara secara keseluruhan maupun bagi masyarakatnya. Kemakmuran tersebut hanya dapat dicapai apabila pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara berhasil dengan baik (Elidawaty Purba & Manurung, 2023). Pembangunan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan menciptakan keadilan sosial. Kesejahteraan dan keadilan dapat terwujud apabila pembangunan dilakukan secara merata di seluruh wilayah.

Namun, dalam praktiknya, pembangunan sering kali menghadapi tantangan berupa ketimpangan ekonomi antarwilayah, yang menghambat tercapainya pemerataan hasil pembangunan (Mara & Rambey, 2018). Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang terus meningkat mencerminkan perkembangan positif dalam aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan

ketika terjadi peningkatan produksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas ekonomi mampu menghasilkan pendapatan tambahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam periode tertentu (Ardian et al., 2022).

Menurut (Sukirno, 2011) dalam konteks makroekonomi, pertumbuhan ekonomi dianggap rendah apabila berada di bawah angka 4 persen per tahun, terutama untuk negara-negara berkembang yang idealnya mampu tumbuh di atas 5 persen. Rendahnya pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas produksi nasional tidak meningkat secara optimal dan sering kali disebabkan oleh ketimpangan distribusi sumber daya, terbatasnya lapangan kerja, rendahnya investasi, serta lemahnya kualitas sumber daya manusia. Jika pertumbuhan ekonomi berlangsung secara tidak merata, maka akan terjadi kesenjangan dalam penyediaan infrastruktur, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta distribusi pendapatan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang rendah tidak hanya mencerminkan perlambatan output nasional, tetapi juga menjadi indikator awal dari kegagalan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari keindahan wisata bahari, pertanian, peternakan, hingga potensi energi terbarukan seperti panas bumi dan tenaga surya. Namun, potensi ini belum sepenuhnya memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2023 hanya sebesar 3,52%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 5,05%, dan masih didominasi oleh sektor primer seperti pertanian (29% PDRB) yang

memiliki produktivitas rendah (BPS NTT, 2024). Selain itu, kapasitas pemanfaatan energi panas bumi di NTT baru sekitar 18 MWe dari total potensi 900 MW (ESDM, 2023), menunjukkan belum optimalnya pengelolaan sumber daya. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa tingginya potensi sumber daya belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata dan berkelanjutan di NTT.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami tantangan serius terkait ketenagakerjaan dan kemiskinan yang diderita meskipun jumlah penduduk terus meningkat dan potensi alam melimpah. Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja terserap di sektor informal (sekitar 74–75%) sehingga kesempatan kerja formal terbatas serta upah rendah. Penelitian (ERNESTUS HOLIVIL, 2024) menegaskan bahwa dominasi sektor informal dan kualitas SDM yang rendah menjadi faktor utama penyebab ketimpangan ketenagakerjaan dan kemiskinan struktural di NTT.

Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTT pada tahun 2023 sebesar 3,14%, meskipun lebih rendah dari rata-rata nasional 5,32%, namun tingginya proporsi pekerja sektor informal dan kualitas pekerjaan yang rendah menyebabkan pengangguran terselubung tetap tinggi (BPS NTT, 2023). Rendahnya daya serap pasar kerja, terutama di sektor formal, menandakan adanya ketimpangan dalam distribusi lapangan kerja dan lemahnya basis industri. Berdasarkan data BPS NTT pada Agustus 2016, meskipun tingkat pengangguran terbuka relatif lebih rendah (~3,25%), namun TPAK mencapai hanya di kisaran 66–72%, dengan mayoritas angkatan kerja masih di sektor pertanian yang produktivitasnya rendah dan sporadis. Kombinasi antara pertumbuhan penduduk, rendahnya lapangan kerja

formal, dan ketergantungan pada sektor informal menghasilkan ketimpangan distribusi kesempatan kerja dan memperparah kemiskinan di NTT.

Hal ini diperparah oleh infrastruktur yang belum merata, akses transportasi antarwilayah yang terbatas, dan minimnya investasi industri berskala besar. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menghadapi tantangan serius pada pembangunan infrastruktur dan investasi industri. Berdasarkan hasil penelitian oleh dalam *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, infrastruktur transportasi terutama jaringan jalan dan konektivitas wilayah antar pulau masih minim, sehingga membatasi mobilitas barang dan orang di berbagai daerah terpencil di NTT (Sitorus et al., 2017).

Di samping itu, *Statistik Industri Besar dan Sedang NTT 2022* dari (BPS, 2022) mencatat bahwa jumlah industri besar dan sedang di wilayah ini masih sangat sedikit, dan jumlah tenaga kerja hingga nilai tambah industri masih rendah, menunjukkan minimnya investasi sektor manufaktur berskala besar di provinsi tersebut. Kondisi ini memperburuk ketimpangan pembangunan karena potensi ekonomi NTT belum didukung oleh infrastruktur memadai maupun basis industri yang kuat.

Ketimpangan tersebut menunjukkan adanya kemiskinan struktural, di mana masyarakat miskin tidak hanya kekurangan pendapatan, tetapi juga terhambat oleh sistem sosial dan ekonomi yang membatasi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi (Sukirno, 2011). Dampak ketimpangan ini tergambar dalam analisis (Jewaru & Siagian, 2022) yang menunjukkan bahwa NTT berada dalam lima besar provinsi dengan indikator pengurangan kemiskinan dan ketimpangan

pendapatan paling rendah di Indonesia, sekalipun memiliki pertumbuhan ekonomi inklusif yang minim.

Sebagai salah satu provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia (19,96% pada tahun 2023 menurut BPS), NTT menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola potensi jumlah penduduk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk sering dianggap sebagai salah satu faktor penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertambahan jumlah penduduk dapat berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi karena bertambahnya populasi akan memperluas pasar. Kondisi ini mendorong peningkatan tingkat spesialisasi dalam berbagai sektor ekonomi, yang pada akhirnya mempercepat perkembangan ekonomi (Desmawan et al., 2023).

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi aset sumber daya manusia yang berharga apabila didukung oleh pendidikan berkualitas dan keterampilan kerja yang memadai. Namun, tantangan seperti minimnya investasi dalam pendidikan dan terbatasnya kesempatan kerja cenderung memperbesar tingkat pengangguran terbuka, meskipun sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal (Amar et al., 2022). Saat ini, jumlah penduduk memainkan peranan yang signifikan dalam aktivitas ekonomi suatu wilayah.

Daerah dengan populasi yang besar memiliki potensi pasar yang luas, karena jumlah penduduk yang tinggi mendukung peningkatan aktivitas produksi dan konsumsi. Semakin banyak penduduk, semakin besar pula jumlah konsumen yang tersedia, yang dapat mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut (Darma & Wulansari, 2021). Selain itu, populasi yang besar juga sering kali

mencerminkan bahwa suatu daerah sedang berkembang pesat, mengindikasikan adanya dinamika ekonomi yang aktif dan potensi pertumbuhan yang lebih besar.

Menurut data (BPS 2023) , Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati urutan ke-12 secara nasional dalam jumlah penduduk menurut data BPS tahun 2023, dengan total populasi mencapai sekitar 5,65 juta jiwa. Di kawasan Indonesia bagian timur, NTT berada pada posisi kedua setelah Sulawesi Selatan dalam hal jumlah penduduk. Namun, jumlah penduduk yang besar belum berdampak optimal terhadap kemajuan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun 2023 hanya mencapai 3,52%, jauh tertinggal dari rerata nasional sebesar 5,05%, serta di bawah provinsi lain seperti Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara.

Tingkat pengangguran adalah salah satu aspek prioritas dalam pembangunan yang harus ditekan. Salah satu ukuran yang digunakan untuk menganalisis pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT mengacu pada rasio antara jumlah individu yang sedang mencari pekerjaan dengan total angkatan kerja, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Indikator ini berfungsi untuk menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori pengangguran di suatu wilayah atau daerah (Noviatamara et al., 2019).

Kemiskinan dapat juga diartikan sebagai ketidak mampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan sering kali berujung pada kurangnya asupan gizi yang cukup, sehingga berdampak pada penurunan kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu, kemiskinan juga memengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, yang pada akhirnya menyulitkan mereka untuk bersaing di dunia kerja.

Pemerintah terus berupaya mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia (Sukirno, 2011).

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2023 (Data Diolah)

Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam empat tahun terakhir cenderung lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Pada tahun 2022, ekonomi NTT tercatat tumbuh sebesar 3,05%, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai sekitar 5,31% (BPS NTT, 2023; BPS RI, 2023). Kondisi ini kembali berulang pada tahun 2023, di mana ekonomi NTT hanya tumbuh sebesar 3,52%, sementara rata-rata nasional tetap berada pada kisaran 4,94% (Bank Indonesia NTT, 2024). Perbedaan ini mencerminkan kesenjangan dalam laju pertumbuhan antara wilayah timur dan nasional yang masih cukup signifikan, terutama dalam hal daya saing ekonomi dan kontribusi sektoral terhadap PDRB.

Selain itu, dibandingkan dengan dua provinsi lain di kawasan Bali-Nusra, yaitu Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB), NTT juga menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang paling rendah. Misalnya, pada triwulan I tahun 2023, pertumbuhan ekonomi NTT tercatat 3,52% (y-on-y), sementara NTB tumbuh 5,22% dan Bali mencapai 6,04% (BI NTT, 2023). Rendahnya pertumbuhan ini disebabkan oleh

berbagai faktor struktural, seperti dominasi sektor primer yang rentan terhadap cuaca dan harga pasar, rendahnya tingkat investasi, terbatasnya infrastruktur, serta kualitas sumber daya manusia yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan terarah agar NTT dapat mengejar ketertinggalannya dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

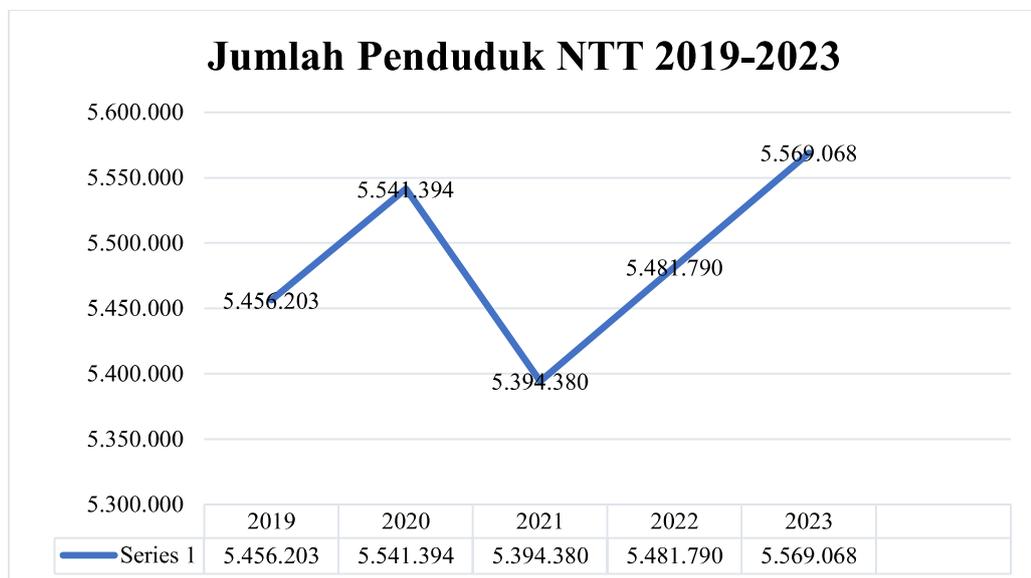
Menurut data yang disampaikan oleh (RNC, 2022), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati peringkat ke-33 dalam pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2022, dengan angka pertumbuhan sebesar 3,05%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 5,44%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun NTT memiliki potensi ekonomi yang besar, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam aspek ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan dapat menghambat peningkatan produktivitas dan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Untuk memacu pertumbuhan yang lebih merata, NTT perlu fokus pada pengembangan infrastruktur, penyediaan layanan publik yang lebih baik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, penguatan sektor industri kreatif dan pariwisata dapat menjadi pendorong ekonomi yang signifikan, mengingat potensi alam dan budaya yang dimiliki NTT. Ke depannya, kebijakan yang mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas akan sangat penting untuk mempercepat transformasi ekonomi di provinsi ini.

Sektor pariwisata dan industri kreatif juga menawarkan peluang besar sebagai penggerak ekonomi yang signifikan. Kekayaan alam dan budaya di NTT, seperti

keindahan Pulau Komodo, Danau Kelimutu, serta tradisi tenun ikat yang khas, dapat menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah NTT telah menunjukkan tren peningkatan, meskipun pandemi sempat menghentikan sebagian besar aktivitas wisata. Oleh karena itu, optimalisasi sektor ini dengan pengelolaan yang berkelanjutan dapat memberikan dampak positif tidak hanya pada pendapatan daerah tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja baru.

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk NTT 2019 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2023 (Data Diolah)

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah jumlah penduduk. Menurut data pada gambar di atas Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan peningkatan jumlah penduduk yang cukup stabil selama periode 2019 hingga 2023. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Sensus Penduduk 2020 menunjukkan populasi mencapai 5,5 juta jiwa. Hingga tahun 2023, jumlah penduduk diperkirakan mencapai 5,6 juta jiwa, mencerminkan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 1%. Sebaran penduduk di NTT cukup beragam, dengan beberapa wilayah seperti

Kupang, Sumba Timur, dan Flores menjadi pusat konsentrasi populasi yang lebih besar.

Pertumbuhan yang lebih signifikan di daerah-daerah ini umumnya didorong oleh urbanisasi, aktivitas ekonomi, dan konsentrasi pembangunan infrastruktur. Sementara itu, wilayah-wilayah dengan populasi lebih sedikit, terutama daerah terpencil, menghadapi tantangan dalam akses layanan publik dan infrastruktur yang memadai. Perkembangan ini memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan. Upaya untuk meningkatkan distribusi layanan publik, infrastruktur, dan aksesibilitas bagi masyarakat di daerah terpencil menjadi prioritas penting.

Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka NTT 2019 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2023 (Data Diolah)

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama periode 2019 hingga 2023 mencerminkan perubahan dinamika tenaga kerja di wilayah tersebut. Pada tahun 2019, TPT berhasil turun hingga 3,35%, yang menjadi titik terendah dalam satu dekade terakhir. Namun, dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 berpengaruh besar

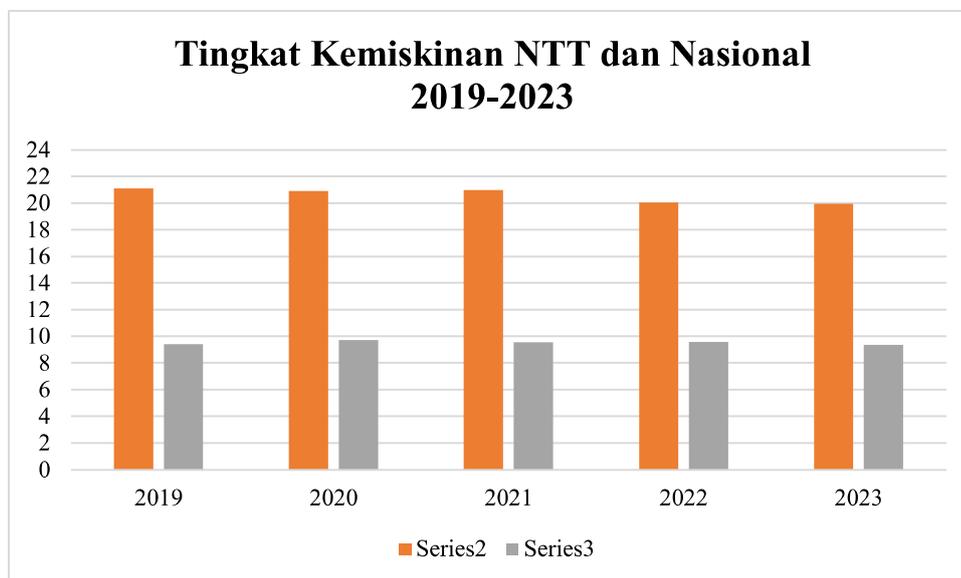
terhadap pasar kerja, menyebabkan TPT kembali meningkat menjadi 4,28% pada tahun 2021. Krisis tersebut dirasakan terutama di sektor-sektor yang bergantung pada pariwisata, perdagangan, dan jasa.

Setelah pandemi, pemulihan ekonomi mulai terlihat, dan pada tahun 2023, angka TPT berhasil turun lagi menjadi 3,14%. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi ekonomi serta keberhasilan berbagai program pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, seperti melalui program padat karya dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Distribusi TPT di NTT tidak merata. Di wilayah perkotaan seperti Kupang, angka pengangguran cenderung lebih tinggi karena konsentrasi aktivitas ekonomi yang lebih besar, serta adanya urbanisasi yang meningkatkan jumlah pencari kerja. Sebaliknya, di daerah pedesaan, meskipun angka pengangguran lebih rendah, banyak penduduk yang bekerja di sektor informal dengan tingkat produktivitas yang lebih rendah.

Untuk mengurangi kesenjangan pengangguran antara perkotaan dan pedesaan di NTT, diperlukan strategi yang terfokus. Di kota seperti Kupang, upaya dapat diarahkan pada peningkatan sektor formal melalui investasi di industri manufaktur, jasa, dan teknologi, yang mampu menciptakan lebih banyak peluang kerja dengan produktivitas tinggi. Sementara itu, di pedesaan, prioritas diberikan pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan modernisasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, didukung oleh akses kredit mikro dan pelatihan keterampilan. Mengingat sektor informal masih dominan di pedesaan, program padat karya dapat menjadi solusi untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan infrastruktur dasar seperti irigasi. Dengan integrasi produk lokal ke pasar yang lebih luas, baik nasional

maupun ekspor, NTT berpotensi mengatasi ketimpangan pengangguran secara lebih efektif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Gambar 1.4 Tingkat Kemiskinan NTT 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2023 (Data Diolah)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diolah dalam grafik di atas, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi NTT pada periode 2019 hingga 2023 secara konsisten berada jauh di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Selama lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin di NTT berkisar antara 20% hingga 22%, sementara tingkat kemiskinan nasional cenderung stabil pada kisaran 9% hingga 10%. Meskipun secara umum terjadi tren penurunan baik pada tingkat nasional maupun regional, selisih yang cukup besar antara keduanya menunjukkan bahwa pembangunan kesejahteraan di NTT masih tertinggal dibandingkan rata-rata nasional.

Tingginya angka kemiskinan di NTT mengindikasikan adanya permasalahan struktural yang belum teratasi secara optimal, seperti terbatasnya lapangan kerja formal, ketergantungan pada sektor ekonomi produktivitas rendah seperti pertanian

tradisional, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur ekonomi.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berpihak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemberdayaan ekonomi lokal sebagai strategi penurunan kemiskinan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana faktor jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di NTT, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan memiliki keterkaitan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Dengan memahami hubungan antara jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi NTT, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan publik yang lebih efektif. Kebijakan yang tepat dapat membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTT serta mendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata di provinsi tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti sebagai mahasiswa prodi ekonomi pembangunan tertarik untuk menganalisis sejauh mana jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Oleh itu, penulis memilih judul **“Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Nusa Tenggara Timur”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur?
2. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur?
3. Apakah tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur.

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan objek penelitian pada Nusa Tenggara Timur (NTT). Penelitian ini

mencakup data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait untuk menganalisis jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur pada periode 2004-2023.

Penelitian ini berfokus pada beberapa variabel utama. Variabel independen yang dianalisis adalah jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan. Sementara variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dengan batasan waktu antara tahun 2004 hingga 2023, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara jumlah penduduk, pengangguran, dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber resmi, seperti BPS, yang telah diverifikasi dan dianggap valid untuk tujuan analisis statistik.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dengan menambah wawasan dan informasi terkait pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam memahami hubungan variabel-variabel tersebut, serta mendukung pengembangan teori mengenai pertumbuhan ekonomi daerah

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah, akademisi dan pelaku ekonomi dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.